BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, dalam buku “Pengantar Penelitian Hukum” penelitian hukum dapat dibedakan dalam : (a). Penelitian hukum normatif dan (b) Penelitian hukum sosilogis, dan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah bersifat preskriptif yang memberikan gambaran atau rumusan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada (Suratman & Dillah 2015).

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Menyatakan bahwa metode kualitatif lebih mampu mengungkap realitas ganda, lebih mengungkap hubungan wajar antara peneliti dengan responden metode kualitatif lebih sensitif dan adaptif terhadap peran berbagai pengaruh timbal balik (Prof Muhadjir, 2002).

Penggunaan pendekatan kualitatif menurut Vredenberg yang dikutip oleh Alwasilah memiliki beberapa pertimbangan, antara lain : 1) penelitian kualitatif menyajikan bentuk yang menyeluruh (holistik) dalam menganalisa suatu fenomena; 2) penelitian jenis ini lebih peka menangkap informasi kualitatif deskriptif, dengan cara relatif tetap berusaha mempertahankan keutuhan (*wholeness*) dari obyek yang berarti bahwa data yang dikumpulkan, dipelajari sebagai keseluruhan yang terintegrasi (A Chaedar, 2002).

Penelitian dengan paradigma kualitatif berupaya mengembangkan ranah penelitian dengan terus menerus menerus memperluas pertanyaan penelitian, dan bahkan memunculkan pemikiran dan hipotesis baru dan isu baru bagi penelitian terkait berikutnya.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum adalah bahan hukum bukan data atau faktor sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normative yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normative. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

3.2.1. Jenis Data

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, penulis lakukan dengan cara mengutip bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Hukum tidak terkodifikasi seperti hukum adat, yurisprudensi, Traktat dan bahan hukum zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diterjemahkan dari (*wetboek van strafrecht*). Atau dengan kata lain bahan hukum primer diperoleh dari buku-buku berkenaan dengan landasan teori, Undang-Undang, Peraturan-Peraturan terkait penelitian dan jenis peraturan lainnya. Jadi sumber data

ini lebih memberikan penjelasan terhadap konsep teoritis dalam penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Dengan kata lain, penulis peroleh dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan teori yang dibahas, makalah, artikel, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi pembahasan landasan teoritis di samping adanya sumber hukum utama (primer).

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan informasi tentang Hukum Primer dan Sekunder.

3.2.2. Alat Pengumpulan Data

Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan guna mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang penulis bahas atau teliti. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan bahan hukum hukum yang diperlukan itu, yaitu menggunakan studi kepustakaan. Studi ini merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, dan putusan pengadilan yang ada baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.

3.3. Metode Analisis Data

Analisis data adalah bagian faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan sebuah penelitian dan merupakan proses mengorganisasikan dan

mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar berdasarkan studi perpustakaan. Pada tahap ini data di klasifikasikan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif bukan kuantitatif, karena dalam penulisan ini tidak menggunakan rumus statistik dan maupun berupa angka-angka sehingga data yang diperoleh hanya penjelasan mengenai masalah yang di teliti. Pemecahan masalah tersebut menggunakan metode kualitatif karena masalah yang diselidiki mengenai suatu gambaran atau melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian meliputi pemerintah/swasta, lembaga/organisasi dan masyarakat.

3.4. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan berhubungan dengan Penegakan hukum Pidana khususnya yang berkaitan terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online yang saya kaji dan teliti antara lain :

1. Berdasarkan penelitian (Warsiman, 2014) dalam Jurnal ISSN No. 2089-8592 Volume 3 No. 1 Januari-Juni 2014 dengan judul **“Tinjauan Hukum Pelacuran Dalam Dunia Maya (Cyber Protitustion) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”** diperoleh bahwa aktivitas berbasis teknologi internet, kini bukan lagi menjadi hal baru dalam masyarakat informasi (*information society*). Internet bahkan sudah digunakan oleh anak-anak prasekolah, orang tua, kalangan pebisnis, instansi, karyawan

hingga ibu rumah tangga. Dan pertanggung jawaban pidana prostitusi secara online harus memenuhi berbagai unsur-unsur tindak pidana (Warsiman, 2014).

Dengan melihat judul diatas yang membahas tentang tinjauan hukum pertanggung jawaban tindak pidana prostitusi online yang harus memenuhi berbagai unsur-unsur tindak pidana maka dapat diketahui perbedaan mendasar antara penelitian yang akan penulis angkat tentang penegakkan hukum pidana terhadap perbuatan tindak pidana prostitusi online berdasarkan studi putusan nomor : 267/pid.b/2015/pn.pgb.

Dalam skripsi ini fokus pembahasan peneliti adalah bagaimana penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana prostitusi online dalam putusan perkara nomor : 267/pid.b/ 2015/pn.pgb.

2. Berdasarkan penelitian (Amalia, 2018) dalam Jurnal ISSN No. 2597-7962 Volume 1 No. 1 Maret 2018 dengan judul **“Prostitusi dan Perzinahan Dalam Presfektif Hukum Islam”** diperoleh bahwa Dalam agama Islam, pelacuran merupakan salah satu perbuatan zina. Pandangan hukum Islam tentang perzinahan jauh berbeda dengan konsep hukum konvensional atau hukum positif, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti pelacuran masuk kedalam kategori perzinahan yang harus diberikan sanksi

hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersil ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum. Para pelacur yang rutinitasnya identik dengan perzinahan merupakan bentuk lain dari penyimpangan seksual dimana terjadi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tidak berdasarkan pada ikatan tali perkawinan. Pengaturan serta sanksi terhadap prostitusi atau zina dalam hukum Islam diatur dalam QS Al-Isra' 17 : 32. Q.S An-Nisa; 24:33, QS An-Nur 24 : 2. Maka upaya yang dilakukan dalam mengatasi prostitusi atau zina adalah memupuk ilmu pengetahuan agama, membuat dan membentuk hukum prostitusi dan perzinahan sesuai dengan petunjuk hadist dan al-quran (Amalia, 2018).

Dengan melihat judul diatas yang membahas tentang prostitusi dan perzinahan dalam perspektif hukum islam dan upaya dalam mengatasinya maka dapat diketahui perbedaan mendasar antara penelitian yang akan penulis angkat tentang penegakkan hukum pidana terhadap perbuatan tindak pidana prostitusi online berdasarkan studi putusan nomor : 267/pid.b/2015/pn.pgb.

Dalam skripsi ini fokus pembahasan peneliti adalah bagaimana penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana prostitusi online dalam putusan perkara nomor : 267/pid.b/ 2015/pn.pgb.

3. Berdasarkan penelitian (Pratama, 2017) dalam Jurnal ISSN No. 2580-4561 Volume 1 No. 1, Juni 2017 dengan judul **“Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online”** diperoleh bahwa Cybercrime merupakan salah satu bentuk atau dimensi kejahatan masa kini yang merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi. Salah satu bentuk kejahatan di bidang Cybercrime yaitu tindak pidana prostitusi online. Hasil penelitian diketahui bahwa prostitusi melalui media online adalah suatu perbuatan tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana pelaku prostitusi melalui media online terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Serbabagus, S dan Pratama, 2017)

Dengan melihat judul diatas yang membahas tentang tanggung jawab pelaku tindak pidana prostitusi melalui media online maka dapat diketahui perbedaan mendasar antara penelitian yang akan penulis angkat tentang penegakkan hukum pidana terhadap perbuatan tindak pidana prostitusi online berdasarkan studi putusan nomor : 267/pid.b/2015/pn.pgb.

Dalam skripsi ini fokus pembahasan peneliti adalah bagaimana penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika dan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam

memutus perkara tindak pidana prostitusi online dalam putusan perkara nomor : 267/pid.b/ 2015/pn.pgb

4. Berdasarkan penelitian (Sibuea, 2015) dalam Jurnal ISSN No. 2088-2351 Volume 10 No. 7, Juni 2017 dengan judul **“Penegakan Hukum Prostitusi di Indonesia”** diperoleh bahwa Praktek prostitusi merupakan fenomena lama yang ada sejak adanya peradaban manusia, tak terkecuali di Indonesia. sampai saat ini, sistem hukum di Indonesia hanya menghukum mucikari dari praktek prostitusi. Negara mengalami kekosongan hukum untuk menjerat pengguna kegiatan prostitusi ini. Hukum harus bergerak secara responsif terhadap permasalahan sosial ini. Berbagai upaya perlu dilakukan, antara lain DPR RI segera menyelesaikan RUU KUHP dengan memasukkan konsep hukuman bagi pengguna kegiatan prostitusi (Sibuea, 2015).

Dengan melihat judul diatas yang membahas tentang penegakan hukum prostitusi di Indonesia secara umum, maka dapat diketahui perbedaan mendasar antara penelitian yang akan penulis angkat tentang penegakkan hukum pidana terhadap perbuatan tindak pidana prostitusi online berdasarkan studi putusan nomor : 267/pid.b/2015/pn.pgb

Dalam skripsi ini fokus pembahasan peneliti adalah bagaimana penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam

memutus perkara tindak pidana prostitusi online dalam putusan perkara nomor : 267/pid.b/ 2015/pn.pgb.

5. Berdasarkan penelitian (Musa Ridho, 2017) dalam Jurnal ISSN Online No. 1478761011 Volume 1 No. 1, November 2017 dengan judul **“Peran Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Eksplorasi Seksual) Melalui Media Elektronik”** diperoleh bahwa Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan landasan yuridis serta bukti nyata komitmen pemerintah memberantas tindak pidana tersebut. Tujuan dalam penulisan ini adalah mengidentifikasi faktor yang menjadi penyebab maraknya tindak pidana perdagangan orang, mengkaji realitas tindak pidana perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual di Kota Semarang dan menganalisa peran pelaksanaan penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual melalui media elektronik (Ridho, 2016).

Dengan melihat judul diatas yang membahas tentang peran Kepolisian pada Polrestabes Semarang dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (eksploitasi seksual) melalui media elektronik, maka dapat diketahui perbedaan mendasar antara penelitian yang akan penulis angkat tentang penegakkan hukum pidana terhadap perbuatan tindak pidana prostitusi online berdasarkan studi putusan nomor : 267/pid.b/2015/pn.pgb.

Dalam skripsi ini fokus pembahasan peneliti adalah bagaimana penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana prostitusi online dalam putusan perkara nomor : 267/pid.b/ 2015/pn.pgb